

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perusahaan membagikan dividen bertujuan untuk meningkatkan kekayaan para pemegang saham (Setiawan dan Yuyetta, 2014). Bertentangan dengan pernyataan Setiawan dan Yuyetta (2014), teori neoklasik menyatakan semua kebijakan dividen setara dan tidak ada kebijakan tertentu yang mampu meningkatkan kekayaan para pemegang saham (Al-Qahtani dan Ajina, 2017).

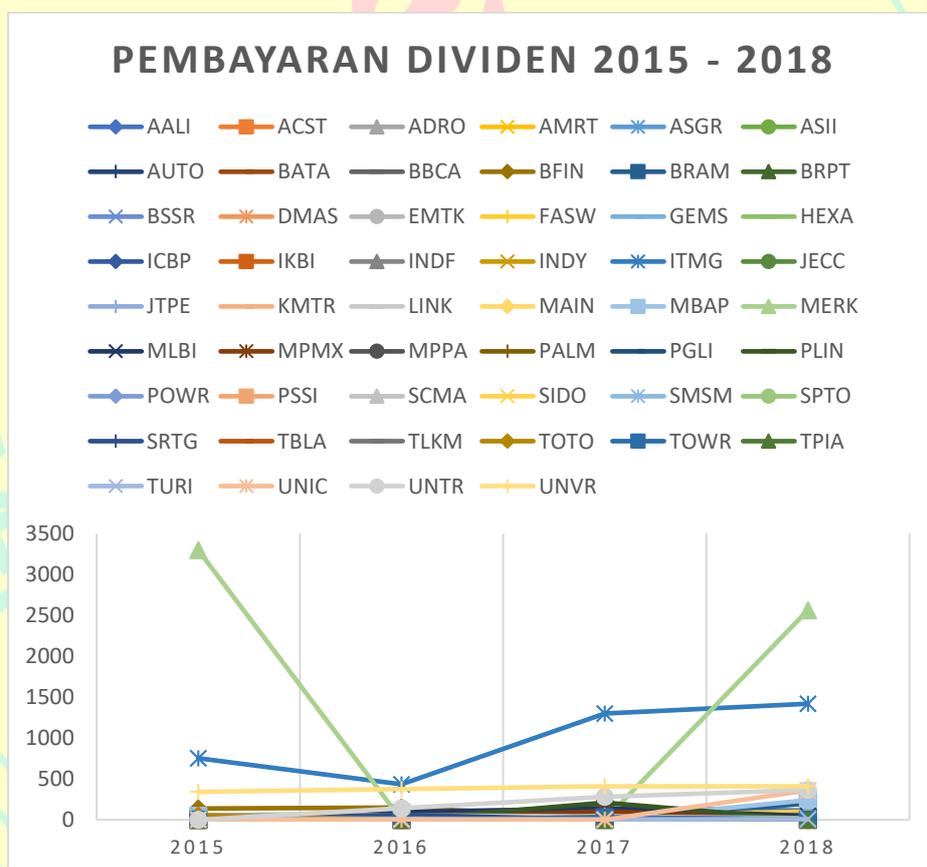
Dividen dapat digunakan sebagai alat pendisiplinan manajerial guna mencegah tindakan mementingkan keuntungan pribadi, seperti perilaku oportunistik (Al-Qahtani dan Ajina, 2017; Jiraporn, 2011) yang mana dapat merugikan pemegang saham minoritas karena kurangnya perlindungan hukum bagi mereka (Xu'nan, 2011). Pembayaran dividen dinilai mampu mendisiplinkan manajerial perusahaan walaupun pemegang saham tidak terlibat langsung dalam pengawasan manajerial (Kadioglu dan Yilmaz, 2017).

Lain halnya dengan pernyataan Lam *et al.* (2012), pembayaran dividen tunai dinilai dapat meningkatkan aktivitas *tunneling* di mana hanya pemegang saham mayoritas saja yang dapat menikmati keuntungan dividen.

Laporan *IDX Statistics* tahunan yang dilansir dari situs BEI tentang pembayaran dividen selama periode 2015 – 2018, menunjukkan hasil yang beragam dari masing-masing perusahaan yang membagikan dividen pada periode tersebut. Dari *line chart* pada Gambar I.1 dapat diketahui bahwa tidak

semua perusahaan membayar dividen secara berturut-turut. Hal ini berkaitan dengan adanya kebijakan untuk menahan laba demi keberlangsungan operasional atau pun karena total laba tahun berjalan yang diperoleh tidak memungkinkan untuk dibagikan sebagai dividen. Ada juga yang membagikan dividen secara berturut-turut walaupun tidak ada perubahan signifikan setiap tahunnya.

Gambar I.1 Pembayaran Dividen 2015 - 2018



Sumber: data diolah oleh peneliti (2021)

Konflik agensi terjadi karena adanya pemisahan kepemilikan dan perbedaan kontrol sehingga terjadi perbedaan ekspektasi dan tujuan antara

kepemilikan manajerial dan pemegang saham (Al-Qahtani dan Ajina, 2017). Pemisahan kepemilikan dan kontrol ini dapat menyebabkan manajerial perusahaan memilih keputusan yang sesuai dengan pilihan dan kepentingan pribadi sehingga tidak dapat memenuhi nilai perusahaan (Berger dan Patti, 2006). Faktor lain penyebab konflik agensi meningkat adalah adanya arus kas bebas yang berlebih cenderung meningkatkan biaya agensi karena adanya konflik kepentingan antara manajerial perusahaan dan pemegang saham (Labhane dan Mahakud, 2016). Maka dari itu, untuk mencegah pengambilalihan kas diperlukan pengawasan aktivitas manajerial sehingga biaya agensi pun meningkat. Untuk mengurangi permasalahan tersebut, perlu adanya pembayaran dividen sehingga dapat mengurangi konflik agensi (Fairchild, 2010).

Kaitan antara konflik agensi dan pembayaran dividen dapat dijelaskan lewat dua hipotesis yang dikemukakan oleh La Porta *et al.* (2000), yaitu hipotesis *outcome* dan hipotesis substitusi. Hipotesis *outcome* menjelaskan bahwa suatu negara yang memiliki perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas cenderung membayar dividen tinggi. Pada hipotesis substitusi, dividen dianggap sebagai pengganti yang erat kaitannya dengan proteksi hukum pemegang saham dan tata kelola pada perusahaan tertentu. Jika tata kelola perusahaan baik di mana direksi mampu mengurangi konflik agensi, maka akan berkurang kebutuhan membayar dividen tinggi kepada pemegang saham. Sebaliknya, jika tata kelola perusahaan buruk, maka perusahaan akan membayar dividen tinggi sebagai ganti rugi atas tata kelola yang buruk.

Setiawan *et al.* (2016) membagi biaya agensi menjadi dua yaitu, konflik antara pemegang saham dan kepemilikan manajerial (Tipe I) dan konflik antara pemegang saham mayoritas dan minoritas (Tipe II). Tipe I sejalan dengan pernyataan Al-Qahtani dan Ajina (2017) karena adanya perbedaan kepemilikan dan kontrol. Tipe II sebagaimana diungkapkan oleh Claessens dan Yurtoglu (2013) menyatakan konflik ini terjadi pada perusahaan dengan kepemilikan manajerial yang tinggi. Di mana para manajerial perusahaan lebih paham tentang kondisi perusahaan dan mempengaruhi keputusan menahan laba untuk kebutuhan operasional di periode berikutnya (Aristanto dan Prasetiono, 2015).

Mengacu pada penelitian sebelumnya (Bokpin, 2011), penelitian ini berfokus pada *ownership structure* dan *corporate governance*. Bokpin (2011) membagi *ownership structure* menjadi *foreign ownership* dan *insider ownership*. Sedangkan *corporate governance* dibagi menjadi *board independence*, *board intensity*, dan *board size*.

Foreign investors memiliki keterbatasan informasi dibandingkan *domestic investors* (Dvořák, 2005; Choe *et al.*, 2005), walaupun mereka memiliki ilmu pengetahuan dan sumber daya yang lebih pada bidang keuangan dan bisnis (Lee, 2008). Tingginya jumlah investor asing di perusahaan akan berdampak pada peningkatan permintaan dan tekanan untuk menyebarkan informasi perusahaan bagi para investor asing (Choe *et al.*, 2005). Investor asing juga berkontribusi pada kinerja perusahaan melalui kegiatan pemegang saham dan menempatkan diri di dewan perusahaan (Choi *et al.*, 2007). Ferreira dan Matos (2008) mengungkapkan perusahaan dengan kepemilikan institusi asing yang

tinggi dan ikatan bisnisnya rendah memiliki valuasi perusahaan yang lebih tinggi di seluruh dunia karena pemilik asing tersebut terlibat dalam pengawasan perusahaan. Lain halnya dengan pernyataan Ullah *et al.* (2012) bahwa investor asing tidak dapat memantau perusahaan secara langsung, sehingga perlu adanya pembayaran dividen sebagai upaya pendisiplinan bagi manajerial perusahaan untuk mengurangi konflik agensi.

Penelitian empiris keterkaitan antara *foreign ownership* dan *dividend payout ratio* telah dilakukan sebelumnya (Al-Najjar dan Kilincarslan, 2016; Baba, 2009; Bangun *et al.*, 2018; Bokpin, 2011; Jayanti dan Puspitasari, 2017; Jeon *et al.*, 2011; Khalfan dan Wendt, 2020; Lam *et al.*, 2012; Setiawan *et al.*, 2016; Ullah *et al.*, 2012; Warrad *et al.*, 2012). Pada pasar maju, Khalfan dan Wendt (2020) meneliti negara-negara Skandinavia di antaranya Denmark, Norwegia, Swedia, dan Finlandia. Dari hasil observasi tersebut ditemukan bahwa di Denmark pemegang saham institusional asing berpengaruh positif terhadap pembayaran dividen. Sedangkan, pemegang saham institusional asing di Norwegia berpengaruh negatif terhadap pembayaran dividen. Pengaruh negatif ini juga terlihat di Swedia dan Finlandia dalam hal peningkatan jumlah pembayaran dividen. Penelitian di Jepang yang dilakukan oleh Baba (2009) menunjukkan adanya pengaruh *foreign ownership* terhadap pembayaran dividen yang tinggi.

Pada pasar berkembang seperti di Korea oleh Jeon *et al.* (2011), kehadiran investor asing mempengaruhi perusahaan untuk membayar lebih dividen. Keterkaitan positif signifikan antara *foreign ownership* terhadap *dividend*

payout policy juga ditemukan pada perusahaan publik di Yordania dilakukan oleh Warrad *et al.* (2012). Penelitian Bokpin (2011) di Ghana menunjukkan adanya pengaruh positif signifikan dalam peningkatan pembayaran dividen pada perusahaan yang memiliki investor asing. Begitu juga dengan penelitian di Pakistan oleh Ullah *et al.* (2012). Sebaliknya, penelitian Lam *et al.* (2012) di China tidak ditemukannya pengaruh positif dan para pemegang saham asing cenderung memilih *cash dividend* yang sedikit untuk mengurangi aktivitas *tunneling*. Penelitian di Turki oleh Al-Najjar dan Kilincarslan (2016) menunjukkan bahwa *foreign ownership* berpengaruh negatif signifikan terhadap *dividend payout*.

Di Indonesia, Jayanti dan Puspitasari (2017) menemukan bahwa tidak ada pengaruh positif dan signifikan antara *foreign ownership* terhadap *dividend payout policy*. Hubungan negatif ini terjadi karena adanya penetapan pajak dividen sebesar 20% bagi investor asing. Penetapan pajak tersebut menyebabkan investor asing cenderung menyukai perusahaan untuk menahan labanya daripada dibagikan sebagai dividen yang menimbulkan penanggungan pajak yang dibebankan kepada investor asing. Sebaliknya, Setiawan *et al.* (2016) menemukan pengaruh positif antara *foreign ownership* terhadap pembayaran dividen. Hasil negatif signifikan juga terlihat pada penelitian Bangun *et al.* (2018).

Insider ownership adalah persentase saham yang dimiliki oleh dewan komisaris dan direksi (Afza dan Mirza, 2010). *Insider ownership* merupakan pihak yang memahami kondisi perusahaan di periode yang akan datang

sehingga dapat memproyeksikan kebutuhan operasional, sehingga laba ditahan meningkat untuk membiayai kebutuhan operasional tersebut (Aristanto dan Prasetiono, 2015). Tentunya, keputusan peningkatan laba ditahan tersebut menimbulkan reaksi negatif dari pemegang saham karena kepentingannya untuk mendapatkan dividen rendah atau bahkan tidak terpenuhi (Damayanti, 2015). Sebaliknya, *insider ownership* juga turut andil dalam upaya mengurangi *agency conflict* demi memperbaiki tata kelola perusahaan serta memenuhi kepentingan pemegang saham (Al-Qahtani dan Ajina, 2017). Adanya ketidaksinambungan antara peran *insider ownership* dalam menetapkan laba ditahan untuk biaya operasional dan pada saat bersamaan turut berperan dalam mengurangi *agency conflict*, membuat variabel ini menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Penelitian empiris telah dilakukan untuk melihat keterkaitan antara *insider ownership* terhadap *dividend payout policy* menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Bokpin (2011) menemukan adanya pengaruh positif tidak signifikan yang menunjukkan bahwa meskipun kepemilikan saham manajerial mampu meningkatkan nilai perusahaan, tetapi hubungannya tidak signifikan. Shahid *et al.* (2016) meneliti pengaruh *insider ownership* terhadap *dividend payout* di Pakistan dan India yang menunjukkan hubungan positif tidak signifikan di Pakistan dan positif signifikan di India. Penelitian Hadamean dan Ratmono (2019) juga menunjukkan hasil positif tidak signifikan antara *insider ownership* terhadap kebijakan dividen pada perusahaan di Indonesia. Pengaruh positif signifikan juga terlihat di Arab Saudi di mana manajerial perusahaan

meningkatkan pembayaran dividen agar mengontrol sikap oportunistik (Al-Qahtani dan Ajina, 2017). Sari dan Budiasih (2016) menghasilkan pengaruh positif antara *insider ownership* terhadap *dividend payout*. Damayanti (2015) menunjukkan adanya pengaruh positif tidak signifikan. Jayanti dan Puspitasari (2017) menunjukkan hasil positif signifikan. Mehdi *et al.* (2017) menemukan hasil positif tidak signifikan di Asia Timur.

Pengaruh negatif tidak signifikan antara *insider ownership* dan *dividend payout* dapat terlihat dari hasil penelitian Aristanto dan Prasetiono (2015) pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Gustian dan Mutasowifin (2016) menemukan pengaruh negatif signifikan antara *insider ownership* terhadap *dividend policy* di perbankan di Indonesia. Sohail *et al.* (2017) menunjukkan hasil negatif signifikan pada perbankan di Pakistan. Ullah *et al.* (2012) menunjukkan hasil negatif signifikan pada perusahaan di Pakistan. Mehdi *et al.* (2017) menemukan hasil negatif tidak signifikan di GCC.

Board independence merupakan komponen penting dalam *board structure* yang berperan sebagai mekanisme efektif dalam mengawasi proses akuntansi dan menjamin integritas laporan keuangan (Mehdi *et al.*, 2017; Setiawan dan Yuyetta, 2014). Selain itu, Borokhovich *et al.* (2005) menyatakan bahwa *board independence* merupakan komponen penting perusahaan untuk melakukan kontrol internal dan pengawasan perusahaan. Kontrol internal yang dilakukan dapat berupa pengendalian perilaku oportunistik manajer.

Sebagai protektor bagi investor, *board independence* bertanggung jawab melindungi pemegang saham minoritas dari tindakan pengambilalihan *free*

cash flow oleh manajerial perusahaan (Shahid *et al.*, 2016; Setia-Atmaja, 2010). Ketika *board independence* dapat berperan aktif dan efektif dalam mengurangi konflik agensi, maka perusahaan tidak memiliki kewajiban membayar dividen dalam jumlah yang besar kepada para pemegang saham (Mehdi *et al.* 2017; Benjamin dan Zain, 2015).

Hasil empiris keterkaitan antara *board independence* dan *dividend payout* menunjukkan hasil positif tidak signifikan pada penelitian Bokpin (2011). Tahir *et al.* (2020) juga menemukan hasil positif tidak signifikan pada hubungan antara *board independence* terhadap pembayaran dividen di Malaysia. Sohail *et al.* (2017) menemukan hasil positif tidak signifikan pada perbankan di Pakistan. Hadamean dan Ratmono (2019) juga menemukan hubungan positif tidak signifikan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Mai (2017) juga menemukan hasil positif tidak signifikan antara *board independence* terhadap kebijakan dividen. Rajput dan Jhunjhunwala (2019) menemukan hubungan positif signifikan antara *board independence* terhadap kebijakan dividen pada perusahaan dengan kepemilikan keluarga. Hasil positif signifikan juga ditemukan di Australia pada penelitian Yarram dan Dollery (2015). Kulathunga *et al.* (2017) juga menemukan bahwa *board independence* berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan dividen.

Berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya (Bokpin, 2011; Tahir *et al.*, 2020; Rajput dan Jhunjhunwala, 2019; Yarram dan Dollery, 2015), Mehdi *et al.* (2017), Benjamin dan Zain (2015), dan Sanan (2019) menemukan adanya pengaruh negatif signifikan antara *board independence* dan *dividend payout*.

Pengaruh negatif tidak signifikan ditemukan pada penelitian Elmagrhi *et al.* (2017), Bangun *et al.* (2018), Sener dan Selcuk (2019), dan Setiawan dan Yuyetta (2014). Shahid *et al.* (2016) menemukan hasil negatif signifikan di India, dan negatif tidak signifikan di Pakistan.

Board intensity dalam penelitian Bokpin (2011) dilihat dari jumlah diadakannya rapat dewan per tahun. Dikarenakan adanya perbedaan sistem tata kelola perusahaan antara lokasi penelitian Bokpin (2011) di Ghana yang menerapkan *one-tier systems* (Debrah dan Botchway, 2019), sedangkan penelitian ini menggunakan data perusahaan di Indonesia yang menerapkan *two-tier systems* (Indonesia Corporate Governance Manual, 2018), maka penelitian ini mengkhususkan pada rapat dewan komisaris sebagai pengawas dan penelaah laporan tahunan termasuk di dalamnya kebijakan pembayaran dividen yang telah disampaikan oleh direksi kemudian disetujui oleh dewan komisaris (UU no. 40 tahun 2007). Pengadaan rapat rutin dewan komisaris telah diatur dalam POJK no. 33 tahun 2014 pada Pasal 31 menyatakan bahwa rapat diadakan sekali dalam dua bulan.

Laksmiana (2008) menyatakan rapat dapat menjadi media untuk menjalankan tugas dan bisa mengarah pada peningkatan efektivitas dewan komisaris. Rapat yang dilakukan secara rutin mampu membantu mengurangi biaya agensi dengan memberikan transparansi informasi kepada pemegang saham (Greco, 2011). Dengan adanya kemampuan untuk mengurangi biaya agensi, maka perusahaan dapat mengurangi kebutuhan untuk membayar dividen dalam jumlah yang tinggi (Benjamin dan Zain, 2015). Sejalan dengan

hipotesis substitusi dari La Porta *et al.* (2000), di mana dividen dianggap sebagai pengganti akibat tata kelola perusahaan yang buruk serta ketidakmampuan untuk mengurangi biaya agensi.

Jika dilihat dari hasil penelitian *board intensity* masih sedikit yang membahas keterkaitannya dengan *dividend policy* (Elmagrhi *et al.*, 2017). Ini menjadi peluang bagi peneliti untuk berkontribusi memberikan hasil penelitian empiris keterkaitan antara *board intensity* dan *dividend policy* khususnya di Indonesia.

Diadakannya rapat hanya pada saat terjadi krisis, memberikan hasil penelitian yang negatif tidak signifikan dengan *dividend policy* (Bokpin, 2011). Hubungan negatif tidak signifikan juga terlihat pada penelitian Sohail *et al.* (2017). Hubungan negatif tidak signifikan antara *board intensity* terhadap *dividend policy* ditemukan oleh Elmagrhi *et al.* (2017) dan Benjamin dan Zain (2015). Mereka beranggapan bahwa rapat yang rutin dilakukan mampu mengurangi biaya dan konflik agensi serta ketidakperluan perusahaan untuk membayar tinggi dividen. Hadamean dan Ratmono (2019) menemukan adanya hubungan positif tidak signifikan antara intensitas rapat terhadap kebijakan dividen. Sebaliknya, Mehdi *et al.* (2017) menemukan adanya hubungan positif signifikan yang terjadi karena adanya keselarasan kepentingan antara pihak manajerial dan pemegang saham melalui *dividend payout policy*.

Board size merupakan jumlah dewan komisaris pada perusahaan (Kulathunga *et al.*, 2017). Secara umum terdapat dua hipotesis terkait *board size* dan *dividend payout policy*. Hipotesis pertama menyatakan bahwa jumlah

anggota dewan komisaris menentukan kemampuan untuk mengawasi manajemen dan mengontrol pemegang saham (Sener dan Selcuk, 2019). Dilihat dari hipotesis tersebut, hipotesis *outcome* mendukung jumlah anggota dewan komisaris yang banyak demi efektivitas pengawasan dan pengontrolan perilaku oportunistik, mengurangi konflik agensi, dan meningkatkan kinerja perusahaan (Ntim *et al.*, 2014). Di sisi lain, dilihat dari hipotesis substitusi, jumlah dewan komisaris yang sedikit dianggap lebih efektif dalam menangani masalah komunikasi dan koordinasi antar anggota (Setayesh dan Ebrahimi, 2012).

Dari dua hipotesis tersebut menimbulkan pertanyaan terkait penentuan jumlah anggota dewan komisaris yang tepat guna menjalankan pengawasan dan pengurangan *agency conflict* secara efektif. Kebutuhan jumlah anggota dewan komisaris tergantung pada kompleksitas perusahaan dan ketersediaan pengalaman dan keahlian yang relevan (Yarram dan Dollery, 2015). Jumlah anggota dewan komisaris yang sedikit mengakibatkan kurang luasnya pandangan anggota dewan komisaris, sedangkan jumlah anggota dewan komisaris yang banyak akan memperpanjang diskusi sehingga pengambilan keputusan cukup lama dan timbulnya masalah komunikasi yang tidak dapat dihindari (Abdullah, 2016). Yarram dan Dollery (2015) menyatakan bahwa sedikitnya anggota dewan komisaris dianggap kurang memenuhi peran pengelolaan yang diharapkan, sedangkan jumlah anggota dewan yang banyak dianggap kurang mampu mengatasi *agency conflict* antara manajerial perusahaan dan pemegang saham.

Penelitian terdahulu yang membahas keterkaitan antara *board size* dan *dividend payout policy* menunjukkan hasil yang berbeda-beda (Bokpin, 2011; Mehdi *et al.*, 2017; Elmagrhi *et al.*, 2017; Bangun *et al.* 2018; Shahid *et al.*, 2016; Hadamean dan Ratmono, 2019; Abor dan Fiador, 2013; Sohail *et al.*, 2017; Kulathunga *et al.*, 2017; Tahir *et al.*, 2020; Yarram dan Dollery, 2015). Bokpin (2011) menemukan adanya pengaruh positif signifikan antara *board size* dan *dividend payout ratio*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penambahan anggota dewan komisaris berdampak pada peningkatan pembayaran dividen. Temuan ini sejalan dengan penelitian Mehdi *et al.* (2017) di Asia Timur, yang menyatakan penambahan jumlah dewan komisaris berpengaruh terhadap pengurangan konflik agensi dan memberikan sinyal positif bagi shareholder terkait peningkatan pembayaran dividen. Hasil positif tidak signifikan ditemukan Mehdi *et al.* (2017) di GCC. Penelitian Shahid *et al.* (2016) menunjukkan adanya pengaruh positif signifikan antara *board size* dan *dividend policy* yang mengindikasikan bahwa jumlah *board size* yang banyak cenderung akan meningkatkan dividen. Elmagrhi *et al.* (2017) dan Tahir *et al.* (2020) juga menemukan pengaruh positif signifikan. Mereka menduga adanya keahlian dalam mengawasi manajerial dan meningkatkan tata kelola perusahaan, mendorong peningkatan pembayaran dividen kepada pemegang saham. Bangun *et al.* (2018) juga menemukan hasil positif signifikan. Sohail *et al.* (2017) menemukan hubungan positif tidak signifikan di Pakistan *Stock Exchange*.

Hadamean dan Ratmono (2019) menemukan hasil negatif signifikan antara *board size* terhadap kebijakan dividen di Indonesia. Dalam penelitian Abor dan Fiador (2013) pada empat negara Afrika Sub-Sahara menemukan bahwa banyaknya jumlah anggota dewan di Afrika Selatan, Nigeria, dan Kenya cenderung membagikan dividen dalam jumlah sedikit. Hal ini terlihat dari hasil yang menunjukkan hubungan negatif tidak signifikan pada Afrika Selatan dan Kenya, dan hubungan negatif signifikan di Nigeria. Dari keempat negara yang diteliti, hanya Ghana yang menunjukkan keterkaitan positif signifikan antara *board size* terhadap pembayaran dividen. Kulathunga *et al.* (2017) menemukan adanya pengaruh negatif tidak signifikan pada sampel perusahaan manufaktur di Sri Lanka. Hasil negatif tidak signifikan juga ditemukan oleh Yarram dan Dollery (2015).

Indeks Kompas 100 dipilih karena dinilai memiliki likuiditas yang tinggi dan kapitalisasi pasar yang besar. Serta, kinerja fundamental dari masing-masing saham pun menjadi pertimbangan dalam kriteria pemilihan saham atau perusahaan yang masuk ke indeks ini. Sehingga, perusahaan yang terdaftar dalam indeks ini dinilai memiliki kinerja perusahaan yang baik. Kapitalisasi pasar yang besar juga mengindikasikan prospek perusahaan ke depannya.

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah serta pemaparan bukti empiris pada setiap faktor yang berpengaruh terhadap *dividend payout ratio*, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Kebijakan Dividen pada

Perusahaan Non-Finansial yang Terdaftar di Indeks Saham Kompas 100 periode 2015 - 2018”.

B. Perumusan Masalah

Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah:

1. Apakah *foreign ownership* berpengaruh terhadap kebijakan dividen pada perusahaan non-finansial yang terdaftar di Indeks Saham Kompas 100 periode 2015 - 2018?
2. Apakah *insider ownership* berpengaruh terhadap kebijakan dividen pada perusahaan non-finansial yang terdaftar di Indeks Saham Kompas 100 periode 2015 - 2018?
3. Apakah *board independence* berpengaruh terhadap kebijakan dividen pada perusahaan non-finansial yang terdaftar di Indeks Saham Kompas 100 periode 2015 - 2018?
4. Apakah *board intensity* berpengaruh terhadap kebijakan dividen pada perusahaan non-finansial yang terdaftar di Indeks Saham Kompas 100 periode 2015 - 2018?
5. Apakah *board size* berpengaruh terhadap kebijakan dividen pada perusahaan non-finansial yang terdaftar di Indeks Saham Kompas 100 periode 2015 - 2018?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah:

1. Mengetahui pengaruh *foreign ownership* terhadap kebijakan dividen pada perusahaan non-finansial yang terdaftar di Indeks Saham Kompas 100 periode 2015 - 2018.
2. Mengetahui pengaruh *insider ownership* terhadap kebijakan dividen pada perusahaan non-finansial yang terdaftar di Indeks Saham Kompas 100 periode 2015 - 2018.
3. Mengetahui pengaruh *board independence* terhadap kebijakan dividen pada perusahaan non-finansial yang terdaftar di Indeks Saham Kompas 100 periode 2015 - 2018.
4. Mengetahui pengaruh *board intensity* terhadap kebijakan dividen pada perusahaan non-finansial yang terdaftar di Indeks Saham Kompas 100 periode 2015 - 2018.
5. Mengetahui pengaruh *board size* terhadap kebijakan dividen pada perusahaan non-finansial yang terdaftar di Indeks Saham Kompas 100 periode 2015 - 2018.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan tambahan ilmu pengetahuan manajemen keuangan serta menjadi sumber referensi mengenai struktur kepemilikan dan tata kelola perusahaan terhadap kebijakan dividen pada perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham Kompas 100 periode 2015 – 2018.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan yang Diteliti

Bukti empiris dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pertimbangan bagi perusahaan terkait penentuan kebijakan dalam pengambilan keputusan terkait struktur kepemilikan dan tata kelola perusahaan terhadap kebijakan dividen.

b. Bagi Investor dan Calon Investor

Bukti empiris dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai pengaruh struktur kepemilikan dan tata kelola perusahaan terhadap kebijakan dividen serta menjadi pertimbangan sebelum berinvestasi pada perusahaan non-finansial yang terdaftar di Indeks Saham Kompas 100.

